

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Amiruddin & Zainal Asikin., 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Ubaedillah, & A. Rozak, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Kencana, Jakarta.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Banten.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2004, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta.
- Bryan A. Garner, 2014, *Black's law dictionary with guide to Pronounciation*, West Publishing, St. Paul.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- H. Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibnu Santoso, 2011, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Immanuel Kant, *Methaphysiche Anfangsgrunde*, dalam Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta CV, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 1998, *Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006, *Memahami untuk Membasmi. Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, KPK, Jakarta.
- Loebby Loqman, 1996, *Masalah Tindak Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta.

- Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- M. Kusnardi, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- National Risk Assessment (NRA), 2019, *Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015*, PPATK, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2019, *Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, Edisi Juni 2019, Vol. 112, PPATK, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2008, *Pengkajian hukum tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional dalam Konvensi PBB*, Departemen Hukum dan HAM RI-Badan pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rozikin Daman, 1993, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rudi Pardede, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sri Mamudj, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Universitas Indonesia, Depok.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, dalam Rukmini, M., 2007, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumni, Shoim, M., 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tindakan Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Pelatihan IAIN Walisongo Semarang, Semarang.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Syed Hussein Alatas, 1975, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Wiratno, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Yunus Husein, 2017, *Pengembalisan Aset Hasil Tindak Pidana (Asset Recovery) dan Corporate Criminal Liability*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

*Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

*Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, LN Nomor 140 Tahun 1999, TLN Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi

*Undang-Undang Tentang Keuangan Negara*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, TLN Nomor 4286.

*Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, LN Nomor 5 Tahun 2004, TLN Nomor 4355.

*Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN Nomor 157 Tahun 2009.

*Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, LN Nomor 18 Tahun 2006.

*Undang-Undang Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, LN Nomor 32 Tahun 2006.

*Peraturan Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Bendahara*, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007, LN Nomor 147 Tahun 2007.

## **C. Jurnal, Tesis, Makalah**

- Adriansyah, 2006, *“Peradilan In Absentia dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hak Terdakwa Tindak Pidana Korupsi”*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok.
- Arifiansyah, 2006, *Peranan Kejaksaan dalam Pengadilan In Absentia sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arly Y. Mangoli, 2016, *Eksistensi Peradilan In Absentia dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia Menurut KUHAP*, Jurnal, Vol. 3, Lex Crimen.
- A.A. Made Yuda Dewi Hendrata, A.A. Sagung Laksmi Dewi, dan I Nengah Laba, 2019, *Persidangan in Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid-Sus-Tpk/2017/Pn MTR)*, Jurnal Analogi Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali.
- B.Arief Sidharta, 2004, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam Jentera (Jurnal Hukum), Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.
- Chandra Ayu Astuti & Anis Chariri, 2015, *Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi*, Journal of Accounting, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Darmono, 2012, *Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Lex Jurnalica, Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hlm. 137.
- Eddy Mulyadi Soepardi, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, Universitas Pakuan Bogor, Bogor.
- James S. Bowman & Jonathan P. West, 2007, *Lord Acton and Employment Doctrines: Absolute Power and the Spread of At-Will Employment*, Journal of Business Ethics, Springer.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Annual Report KPK 2006*, Jakarta: KPK.
- M. Mahfud M.D., 1993, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Muladi, 1993, *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan White Collar Crime*, Yogyakarta: Makalah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Muhammad Shoim, 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tigkap Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Semarang: Pusat Pelatihan IAIN Walisongo Semarang.
- M. Syamsa Ardisasmita, 2006, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta: KPK.
- Nadiatus Salama, 2010, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Ni'matul Huda 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.
- Ricardo Santos dan Hery Firmansyah, 2021, *Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance Terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan Ke Luar Negeri*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

## Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Peradilan Inabsensiaupsi

BRILLIANTONY DWI P H, Dr. Supriyadi S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Saputra, 2012, *Pelaksanaan Peradilan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya dengan Hak-hak Terdakwa*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Suraji, 2008, *Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia & Upaya Pemberantasannya*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Wana Alamsyah, 2020, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*, Indonesia Corruption Watch.

Wibowo, 2009, *Peran Hukum dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV.

### D. Internet

Ayu Andini, “Kasus Korupsi Menurun, Kerugian Negara Memuncak”, <https://lokadata.id/artikel/kasus-korupsi-menurun-kerugian-negara-memuncak>

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Penerapan SPIP Terkait dengan Hasil Survei PERC*, melalui <http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/1530/10.470-Upaya-Pencegahan-Korupsi-MelaluiPenerapan-SPIP-Terkait-dengan-Hasil-Survei-PERC>

CNN Indonesia, “Rangking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 180”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180>

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Dampak Korupsi terhadap Ekonomi”, <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-ekonomi>.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia”, <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia>.

Liputan6.com, 2003, “Hendra Rahardja Meninggal di Australia”, <https://www.liputan6.com/news/read/48600/hendra-rahardja-meninggal-di-australia>.

Lokadata.id, Penindakan Kasus Korupsi oleh KPK, 2015-2019, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/penindakan-kasus-korupsi-oleh-kpk-2015-2019-1582258585>.